



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IQBAL REZA NUGRAHA
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 245838

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 38 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/125 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **392.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, KTM KTM RC 250 CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOBIL, TOYOTA TOYOTA RAIZE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 177.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **15.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **2.324.673.945**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

7.032.173.945

III. HUTANG

Rp.

2.489.717.200

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.542.456.745

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.